

### 5.1.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas merupakan selisih antara total aset dengan total hutang. Ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp2.076.102.226.317,07 terdiri dari:

**Tabel 193 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas**

(dalam rupiah)

| URAIAN                                                  | 31 Desember 2024<br>(Rp)    | 31 Desember 2023<br>(Rp)    | Bertambah/Berkurang<br>(Rp) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ekuitas Awal                                            | 2.123.464.533.034,41        | 2.117.398.331.409,03        | 6.066.201.625,38            |
| Surplus/Defisit - LO                                    | (57.166.468.760,69)         | (27.517.873.239,02)         | (29.648.595.521,67)         |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar | 9.804.162.043,35            | 33.584.074.864,40           | (23.779.912.821,05)         |
| <b>JUMLAH</b>                                           | <b>2.076.102.226.317,07</b> | <b>2.123.464.533.034,41</b> | <b>(47.362.306.717,34)</b>  |

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 5.1.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal sebesar Rp2.123.464.533.034,41 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2023 pada Neraca *Audited* tahun 2023.

#### 5.1.6.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO pada Tahun 2023 sebesar Rp(57.166.468.760,69) merupakan nilai Defisit pada Laporan Operasional Tahun 2024 yang berasal dari:

##### PENDAPATAN

|                                  |           |                             |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah LO        | Rp        | 228.105.118.005,64          |
| Pendapatan Transfer LO           | Rp        | 1.348.612.229.211,00        |
| Lain-lain Pendapatan Yang Sah LO | Rp        | 67.623.382.140,05           |
| <b>Total Pendapatan LO</b>       | <b>Rp</b> | <b>1.644.340.729.356,69</b> |

##### BEBAN

|                                 |           |                             |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Beban Operasi                   | Rp        | 1.370.709.757.090,39        |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | Rp        | 218.485.568.845,41          |
| Beban Transfer                  | Rp        | 107.381.385.955,00          |
| Beban Tidak Terduga             | Rp        | 1.733.671.899,00            |
| <b>Total Beban</b>              | <b>Rp</b> | <b>1.698.310.383.789,80</b> |
| Surplus/Defisit dari Operasi    | Rp        | (53.969.654.433,11)         |
| Surplus Non Operasional LO      | Rp        | 388.137.743,65              |
| Defisit Non Operasional - LO    | Rp        | (3.584.952.071,23)          |
| <b>Surplus/Defisit</b>          | <b>Rp</b> | <b>(57.166.468.760,69)</b>  |

#### 5.1.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Selain adanya penambahan ekuitas dari Defisit pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah Tahun 2024, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya yang tercatat dalam Dampak Kumulatif

Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar sejumlah Rp9.804.162.043,35 terdiri dari:

**1) Koreksi Aset Tetap**

Koreksi aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.594.543.500,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

**a) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp1.830.000.000,00**

Terdapat kurang catat aset tetap sebesar Rp1.830.000.000,00 berupa tanah hutan di Desa Sukorejo Sudimoro yang awalnya tercatat diserahkan ke Provinsi ternyata sebagian tanah itu masih milik Pemerintah Daerah dengan No Sertifikat AY160130 pada SKPD Badan Keuangan Daerah sehingga dilakukan koreksi ekuitas sebesar nilai buku aset tanah Rp1.830.000.000,00.

**b) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp(235.456.500,00)**

Salah Pencatatan Nilai Aset senilai Rp470.913.000,00 Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga berupa Sumur boran dari BTT tahun 2020 yang dicatat di 2023 dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata aset BTT tersebut sudah tercatat di KIB dengan Penyusutan Rp235.456.500,00 dan Nilai Buku Rp235.456.500,00 yang menjadi koreksi ekuitas.

**2) Koreksi Penyusutan Aset Tetap**

Terdapat koreksi atas penyusutan aset tetap senilai Rp(3.811.975.631,50) dikarenakan beberapa sebab diantaranya kapitalisasi atas pemeliharaan ke aset induknya, mutasi aset tetap renovasi di tahun berikutnya dimana pada tahun 2023 dilaporkan nilai terpisah, baru ditahun 2024 dimutasikan ke induk masing-masing SKPD dan adanya koreksi lebih catat atau kurang catat dikarenakan adanya belum tercatatnya aset perolehan sebelum tahun pelaporan atau adanya kesalahan penghitungan penyusutan, yang biasanya diketahui setelah adanya inventarisasi. Adapun koreksi penyusutan secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a) Kecamatan Ngadirojo sebesar Rp4.034.381,20**

Ada mutasi ATR Tahun lalu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana sebelumnya tercatat sebagai aset tersendiri nilai penyusutan sebesar Rp4.034.381,20 dikapitalisasi dengan gedung kantor pada SKPD Kecamatan Ngadirojo dan karena proses kapitalisasi tersebut penyusutan ATR hilang berubah menjadi tarif penyusutan Gedung Induk sehingga koreksi ekuitas sebesar Rp4.034.381,20.

**b) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp(1.640.608.553,45)**

Terdapat Perubahan Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu pada Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi Jaringan, dan ATR yang dimutasikan ke beberapa OPD yang perhitungan penyusutan terjadi kesalahan seharusnya pendekatan bulanan dihitung 1 tahun, serta adanya koreksi penyusutan akibat proses kapitalisasi dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 194 Selisih Kesalahan Penghitungan Penyusutan Aset**

*Dalam rupiah*

| No                            | KIB                    | Akumulasi Penyusutan Audited 2023 | Kesalahan Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 per 31 Desember 2024 | Selisih                 |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                             | Peralatan dan Mesin    | 59.075.000,00                     | 53.283.333,33                                                        | 5.791.666,67            |
| 2                             | Gedung dan Bangunan    | 1.930.525.209,55                  | 585.516.970,55                                                       | 1.345.008.239,00        |
| 3                             | Jalan Irigasi Jaringan | 392.063.754,00                    | 101.137.951,07                                                       | 290.925.802,93          |
| 4                             | Aset Tetap Renovasi    | 43.827.469,85                     | 44.944.625,00                                                        | (1.117.155,15)          |
| <b>Jumlah Koreksi Ekuitas</b> |                        | <b>2.425.491.433,40</b>           | <b>784.882.879,95</b>                                                | <b>1.640.608.553,45</b> |

**c) Kecamatan Donorojo sebesar Rp(72.429,33)**

Terdapat Bangunan Gedung senilai Rp10.864.400,00 pada Lembar penyusutan tahun lalu tarif penyusutannya 0 dan pada tahun 2024 dilakukan koreksi disesuaikan tarif penyusutan 0,04. Karena koreksi tersebut Akumulasi tahun lalu muncul penyusutan sebesar Rp72.429,33 dan menjadi koreksi ekuitas.

**d) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebesar Rp(3.994.101,44)**

Terdapat kapitalisasi beberapa Bangunan Gedung yang digabung dan mempengaruhi akumulasi penyusutan tahun lalu berubah. Bangunan Gedung itu awalnya tercatat sendiri dengan Penyusutan 2023 senilai Rp81.523.076,28 dan setelah proses kapitalisasi akumulasi penyusutan tahun lalu berubah menjadi senilai Rp85.517.177,72 selisih Rp3.994.101,44 menjadi koreksi ekuitas.

**e) Kecamatan Kebonagung sebesar Rp2.493.385,56**

Ada mutasi ATR Tahun lalu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana sebelumnya tercatat sebagai aset tersendiri dengan nilai penyusutan sebesar Rp2.493.385,56 dikapitalisasi dengan gedung kantor pada SKPD Kecamatan Kebonagung dan karena proses kapitalisasi tersebut penyusutan ATR hilang berubah menjadi tarif penyusutan Gedung Induk sehingga koreksi ekuitas sebesar Rp2.493.385,56.

**f) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp10.533.998,71**

Ada mutasi ATR Tahun lalu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana sebelumnya tercatat sebagai aset tersendiri dengan nilai penyusutan tahun lalu sebesar Rp11.480.875,00 dikapitalisasi dengan gedung kantor induk dengan nilai penyusutan tahun lalu Rp152.191.144,54. dan karena proses kapitalisasi tersebut penyusutan tahun lalu berubah menjadi sebesar Rp153.138.020,83 sehingga selisih Rp10.533.998,71 menjadi koreksi

**g) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp(27.467.979,17)**

Ada mutasi ATR Tahun lalu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana sebelumnya tercatat sebagai aset tersendiri dengan tarif penyusutan ATR 4 tahun dengan nilai penyusutan sebesar Rp17.476.645,83 dan pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup dilakukan reklas ke jalan dengan tarif penyusutan jalan 0,125 dan karena reklas tersebut akumulasi tahun lalunya berubah menjadi Rp44.944.625,00 selisih 27.467.979,17 menjadi koreksi ekuitas.

**h) Sekretariat Daerah sebesar Rp(7.585.911,25)**

(1) Ada mutasi ATR Tahun lalu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana sebelumnya tercatat sebagai aset tersendiri dengan nilai penyusutan tahun lalunya sebesar Rp6.478.333,33 dikapitalisasi dengan gedung kantor induk dengan nilai penyusutan tahun lalunya Rp400.957.785,50 dan karena proses kapitalisasi tersebut penyusutan tahun lalunya berubah menjadi 401.372.398.83 sehingga selisih Rp6.063.720,00 menjadi koreksi ekuitas.

(2) Terdapat Aset Peralatan dan mesin yang pada tahun 2023 tarif penyusutan belum disesuaikan sehingga tidak terhitung penyusutannya dan belum tercatat penyusutannya dan pada tahun 2024 baru disesuaikan sehingga akumulasi penyusutan tahun lalunya muncul sebesar Rp(13.649.631,25) dan menjadi koreksi ekuitas.

**i) Dinas Kesehatan sebesar Rp(538.125.005,58)**

Terdapat selisih nilai akumulasi penyusutan tahun 2023 atas beberapa bangunan gedung akibat proses penggabungan /kapitalisasi. Akumulasi penyusutan tahun lalu 2023 setelah mutasi, penghapusan, reklas sebesar Rp105.957.057.277,41 dan setelah proses kapitalisasi menjadi Rp106.495.182.282,99 selisih Rp538.125.005,58 menjadi koreksi ekuitas.

**j) Dinas Pendidikan sebesar Rp(1.611.183.416,75)**

(1) Terdapat Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Barang bercorak kebudayaan alat musik modern yang tahun lalu belum disusutkan dan dilakukan koreksi Pencatatan Akumulasi Tahun Lalunya senilai Rp(4.001.379.581,63) menjadi koreksi ekuitas

(2) Kapitalisasi beberapa Bangunan Gedung yang digabung dan mempengaruhi akumulasi penyusutan tahun lalunya setelah mutasi, penghapusan, reklas dan koreksi pencatatan penyusutan barang bercorak kebudayaan sebesar Rp326.469.753.902,47 dan setelah proses kapitalisasi menjadi Rp324.079.557.737,59 selisih Rp2.390.196.164,88 menjadi koreksi ekuitas.

### 3) Koreksi Piutang

Koreksi kesalahan koreksi piutang tahun sebelumnya yang tercatat dalam Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar sebesar Rp14.721.893.641,66 dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp14.675.541.102,00 dengan rincian sebagai berikut.

##### **Terdapat koreksi lebih catat atas piutang PBB-P2 sebesar (Rp36.394.868,00)**

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat ditemukan pada piutang tahun 2018 dimana ketetapan tercatat sebesar Rp16.263.209.226,00 dan ketetapan seharusnya sebesar Rp16.227.446.759,00 sehingga ada selisih sebesar Rp35.762.467,00 dan terdapat lebih bayar masuk realisasi sebesar Rp632.401,00, sehingga total lebih catat piutang PBB-P2 tahun 2018 sebagai pengurang piutang dengan data sebagai berikut :

|                                  |           |                      |
|----------------------------------|-----------|----------------------|
| Selisih catat ketetapan SPPT     | Rp        | 35.762.467,00        |
| Salah catat lebih bayar SPPT     | Rp        | 632.401,00           |
| <b>Total koreksi lebih catat</b> | <b>Rp</b> | <b>36.394.868,00</b> |

##### **Terdapat koreksi kurang catat atas piutang PBB-P2 sebesar Rp149.725.970,00**

berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat ditemukan ada penambahan penetapan SPPT tahun 2014 s/d 2023 sebesar Rp149.725.970,00 dengan data sebagai berikut:

|                                   |           |                       |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Koreksi tahun 2023                | Rp        | 17.788.193,00         |
| Koreksi tahun 2022                | Rp        | 10.564.232,00         |
| Koreksi tahun 2021                | Rp        | 8.149.143,00          |
| Koreksi tahun 2020                | Rp        | 22.930.675,00         |
| Koreksi tahun 2019                | Rp        | 37.973.489,00         |
| Koreksi tahun 2018                | Rp        | 2.182.667,00          |
| Koreksi tahun 2017                | Rp        | 18.230.822,00         |
| Koreksi tahun 2016                | Rp        | 8.473.600,00          |
| Koreksi tahun 2015                | Rp        | 19.860.581,00         |
| Koreksi tahun 2014                | Rp        | 3.572.581,00          |
| <b>Total koreksi kurang catat</b> | <b>Rp</b> | <b>149.725.970,00</b> |

Berdasarkan uraian data lebih catat sebesar (Rp36.394.868,00) dan kurang catat sebesar Rp149.725.970,00 atas piutang PBB-P2 tahun 2014 s/d 2023, sehingga koreksi piutang akhir yang seharusnya adalah hasil selisih kurang catat dan lebih catat, yaitu Rp149.725.970,00 dikurangi dengan Rp36.394.868,00 menjadi Rp113.331.102,00

**Koreksi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Transfer Dana Bagi Hasil) sebesar Rp14.562.210.000,00**

Terdapat pengakuan piutang atas Dana Bagi Hasil Tahun 2023 berdasarkan KMK 44/KM.7/2024 dengan rincian sebagai berikut:

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21                      | 2.909.382.000,00 |
| Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND  | 293.255.000,00   |
| Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB                               | 2.692.215.000,00 |
| Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi                   | 3.153.694.000,00 |
| Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi                      | 2.550.074.000,00 |
| Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent | 47.617.000,00    |
| Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty  | 745.078.000,00   |
| Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi        | 15.620.000,00    |
| Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT                               | 2.155.275.000,00 |

**b) RSUD dr Darsono sebesar Rp46.352.539,66**

Koreksi Piutang Retribusi sebesar Rp46.352.539,66. Koreksi tersebut merupakan piutang atas pasien pelayanan umum yang tercatat di buku bantu bendahara penerimaan atas layanan pasien mulai tahun 2018 s/d 2023 sebanyak 26 pasien dengan nilai sisa tagihan yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp118.603.747,00 dikurangi nilai penyisihan piutang s/d 2023 sebesar Rp72.251.207,34. Koreksi atas piutang tersebut belum dilakukan pada proses audit LKPD Tahun 2023 karena belum ada Peraturan Bupati yang mengaturnya. Tahun 2024 sudah terbit Peraturan Bupati nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 155 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono Pacitan Tanggal 23 September 2024 sebagai dasar pelaksanaan teknis yang mengaturnya.

**4) Koreksi Utang**

Koreksi kesalahan koreksi Utang tahun sebelumnya yang tercatat dalam Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar sebesar (Rp2.666.775.695,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya (Utang Transfer DBH sebesar Rp2.658.347.000,00**

Terdapat pengakuan utang atas Dana Bagi Hasil Tahun 2023 berdasarkan KMK 44/KM.7/2024 dengan rincian sebagai berikut:

Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Sebesar Rp821.483.000,00

Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty Sebesar Rp398.839.000,00

Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi Rp15.474.000,00

Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan Rp1.317.386.000,00

Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp105.165.000,00

**c) Koreksi kurang atas sisa DANA BK TA 2023 senilai Rp(2.370.000,00)**

Terdapat kesalahan pengakuan utang Tahun 2023 Hasil Reviu Inspektorat Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Rekonsiliasi Tripatit di Surabaya)

**d) Koreksi lebih atas sisa DANA BK TA 2023 senilai Rp10.798.695,00**

Penambahan Utang Tahun 2024 atas Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dikembalikan ke kas daerah pada bulan maret 2024 (Berita Acara Rekonsiliasi Tripatit di Surabaya)

**5) Koreksi Penyertaan Modal**

Koreksi Nilai Investasi pada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp(29.682.947,00)

Terdapat koreksi kurang atas nilai investasi Tahun 2023 berdasarkan nilai penyertaan modal pada Laporan Keuangan PDAM Unaudited Tahun 2024 (koreksi penggunaan laba bersih Perusahaan Tahun 2023 )

**6) Koreksi Penyusutan Properti Investasi**

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebesar Rp(3.840.824,81)

Terdapat Koreksi penyusutan akibat reklas Properti Invertasi atas bangunan yang dikapitalisasi ke Aset Tetap. Sehingga pemisahan gedung yang dikapitalisasi mempengaruhi akumulasi penyusutan tahun lalunya sebesar Rp3.840.824,81 dan menjadi koreksi ekuitas.

**5.1.6.3 Ekuitas Akhir**

Jumlah Ekuitas Akhir Pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.076.102.226.317,07 Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp47.362.306.717,34 atau 2,23% jika dibandingkan dengan Ekuitas tahun lalu sebesar Rp2.123.464.533.034,41.